



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG DITARGETKAN SELESAI PADA TAHUN 2026

Brigita Diaz Primadita
Analisis Legislatif Ahli Pertama
brigita.primadita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah menyepakati keberlanjutan program normalisasi Sungai Ciliwung dalam rapat koordinasi dengan Gubernur Jakarta pada tanggal 13 Maret 2025. Normalisasi Sungai Ciliwung ditargetkan selesai pada tahun 2026. Program ini merupakan upaya kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jakarta sebagai penyedia lahan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai pihak yang melakukan betonisasi badan sungai. Normalisasi Sungai Ciliwung bertujuan untuk mengendalikan aliran air hujan kiriman dari daerah hulu di Bogor, Jawa Barat, agar tidak melimpas ke wilayah Jakarta. Menteri PU menyatakan normalisasi sungai akan mengurangi banjir Jakarta hingga 40 persen dan mengoptimalkan kapasitas sungai. Sungai Ciliwung akan diperlebar dari 15 – 20 meter menjadi 30 – 50 meter. Hingga saat ini, 49 persen dari total panjang sungai Ciliwung atau sepanjang 16,55 kilometer dari TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai belum dinormalisasi.

Konsep normalisasi sungai terbukti efektif mengurangi titik banjir di Jakarta dalam jangka pendek. Sebagai contoh, pada tahun 2015 terdapat 702 titik banjir. Setelah normalisasi mulai dilakukan, pada tahun 2018 menurun menjadi 68 titik. Dibandingkan dengan naturalisasi sungai, normalisasi sungai membutuhkan durasi waktu dan ruang yang lebih sedikit. Naturalisasi sungai di hilir Jakarta juga dinilai kurang efektif karena daerah resapannya sudah berkurang dan hanya bisa mengurangi banjir sebesar 5-10 persen.

Pada naturalisasi, sempadan sungai ditanami tanaman yang sesuai serta fungsi dan bentuk sungai dikembalikan sebagaimana aslinya sehingga air juga bisa masuk ke dalam tanah. Pada proses normalisasi, dilakukan pelurusan sungai, pengerukan, dan/atau pembuatan tanggul di bantaran sungai sehingga aliran tidak terhambat karena adanya kelokan atau erosi tebing sungai akibat adanya pemukiman di sempadan sungai. Pada normalisasi Sungai Ciliwung, betonisasi sungai hanya dilakukan pada segmen sungai yang mengalir di pusat kota dengan tujuan memperkuat dinding sungai. Sedangkan pada bagian tengah hulu, bentuk alami masih dipertahankan.

Dalam praktiknya, upaya normalisasi Sungai Ciliwung memiliki beberapa kendala. *Pertama*, penolakan warga atas pembebasan lahan serta banyaknya tanah tak berpemilik. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta memastikan akan melakukan pendekatan humanis dan tidak akan melakukan penggusuran paksa. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pembebasan lahan selesai pada Mei 2025, sehingga pada Juli 2025 Kementerian PU bisa segera melakukan pengerjaan segmen sungai. *Kedua*, masih parsialnya proses konstruksi. Pembebasan dan normalisasi hanya dilakukan di segmen-segmen yang dokumennya sudah lengkap, sehingga wilayah yang kerap banjir justru tidak diprioritaskan. Adakalanya wilayah yang sudah dilakukan pembebasan namun tidak langsung dibangun malah diduduki oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. *Ketiga*, ketidakjelasan pengaturan mengenai garis sempadan sungai di Indonesia pasca terbitnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, yang mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk atas sungai di wilayah masing-masing. Hingga saat ini, belum ada penetapan garis sempadan sungai oleh pejabat yang

ditunjuk, sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan wilayah sekitar sungai.

Dalam jangka panjang, normalisasi sungai dapat menimbulkan konsekuensi, seperti *supply* air tanah berkurang, penurunan muka tanah makin cepat terjadi, dan intrusi air laut. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan upaya antisipasi, antara lain dengan melakukan evaluasi kinerja infrastruktur air. Infrastruktur baru berbiaya besar seperti Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor, serta Sodedan Ciliwung nyatanya belum dapat menjawab permasalahan banjir bila hujan ekstrem terjadi di hilir infrastruktur tersebut. Revitalisasi dan pembangunan tampungan air skala kecil, seperti embung, yang tersebar di sepanjang hulu hingga hilir sungai terbukti lebih efektif. Evaluasi juga perlu dilakukan pada sistem drainase yang belum memperhitungkan peningkatan hujan akibat perubahan iklim dan tata guna lahan. Rehabilitasi daerah tangkapan air di hulu sungai perlu segera dilakukan secara sinergis dengan kementerian lain dan pemerintah daerah. Penyebab utama banjir Jakarta selain tata kelola sungai, adalah penurunan muka tanah dan perubahan iklim. Oleh sebab itu, dalam jangka panjang pemerintah harus dapat menerbitkan aturan mengenai pengawasan penggunaan air tanah dan juga mitigasi-adaptasi infrastruktur terhadap perubahan iklim.

Atensi DPR

Program normalisasi Sungai Ciliwung ditargetkan selesai pada tahun 2026. Proyek ini dilakukan Kementerian PU bersama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta dan Kementerian ATR/BPN. Normalisasi sungai terbukti efektif mengurangi titik banjir di Jakarta dalam jangka pendek. Pelebaran sungai terkendala beberapa hal seperti pembebasan lahan, masih parsialnya proses konstruksi, dan ketidakjelasan garis sempadan sungai. Kasus banjir Jakarta harusnya menjadi titik balik pemerintah dalam penanganan bencana hidrologis di Indonesia. Sinergi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat mitigasi bencana dan rehabilitasi daerah tangkapan air. Komisi V DPR RI perlu melakukan evaluasi kinerja infrastruktur air; mengawasi pelaksanaan tata kelola sungai oleh Kementerian PU; serta mendorong pemerintah menerbitkan peraturan teknis yang baru mengenai garis sempadan sungai di Indonesia, pengawasan pada penggunaan air tanah, dan mitigasi-adaptasi pada perubahan iklim. Komisi V dan Komisi II DPR RI juga perlu memastikan pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah tidak melanggar hak masyarakat.

Sumber

kompas.id, 27 Februari, 7 & 14 Maret 2025;
mediaindonesia.com, 15 Maret 2025;
menlhk.go.id, 9 Januari 2020;
tirto.id, 13 Maret 2025.



EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making